

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi ialah badan usaha yang menyelenggarakan berbagai aktivitas usaha, seperti layanan perkreditan, pemasaran, serta penyediaan kebutuhan keuangan dan layanan usaha lainnya guna mendukung aktivitas ekonomi anggota maupun masyarakat (Maulana et al., 2023). Dalam menjalankan usahanya, koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagai prinsip utama. Di samping itu, koperasi turut memegang peranan yang signifikan dan strategis dalam mendukung pertumbuhan serta penguatan perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2025, hingga 31 Desember 2024 terdapat 131.617 koperasi aktif di Indonesia dengan jumlah anggota yang mendekati 30 juta orang. Pada periode yang sama, koperasi mencatatkan total aset sebesar Rp293 triliun dan volume usaha mencapai Rp214 triliun (UPI, 2025). Di samping itu, sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sekitar 6,2% pada tahun 2024. Data tersebut memperlihatkan bahwa koperasi memegang peran yang kian besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Kemampuan menyajikan laporan keuangan secara efektif menjadi salah satu faktor krusial dalam pengelolaan koperasi, karena melalui laporan tersebut pengurus maupun anggota dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi permodalan, capaian usaha, serta arus kas koperasi dalam suatu periode tertentu. Ketersediaan informasi yang disajikan dengan akurat dan tepat waktu ini menjadi dasar bagi pengurus dalam mengevaluasi kinerja usaha simpan pinjam, menyusun kebijakan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana anggota dalam Rapat

Anggota Tahunan. Karena penerapan standar akuntansi ini tidak cukup apabila dijalankan hanya sebagai formalitas administratif semata, melainkan harus benar-benar diterapkan secara efektif agar laporan yang dihasilkan memiliki keandalan dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan koperasi (Fatahilah, 2025).

Guna menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Permenkop No.2/2024) tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelaporan keuangan di sektor tersebut. Secara garis besar, Permenkop No. 2/2024 mengatur tiga hal pokok, yakni standar dalam penyusunan laporan keuangan, prinsip pengakuan dan pengukuran terhadap komponen keuangan, serta ketentuan pengungkapan data yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan koperasi (Permenkop UKM, 2024).

Ketentuan yang paling mendasar dari regulasi ini tercantum dalam Bab II Pasal 4, yang mewajibkan koperasi dengan kegiatan usaha simpan pinjam untuk mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, kecuali koperasi yang bersangkutan telah menerapkan standar akuntansi yang tingkatannya lebih tinggi. Kewajiban ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mewajibkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Adapun sasaran penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi tetap dituntut untuk menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) demi kepentingan para pengguna eksternal.

Pada Bab III dalam Permenkop No. 2/2024 mengatur bahwa setiap koperasi wajib menyusun dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan periodik yang meliputi periode triwulanan, semesteran, maupun

sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kedua jenis laporan tersebut harus disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang komponennya terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Ketentuan dalam SAK EP tersebut mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 dan menjadi acuan wajib bagi seluruh koperasi simpan pinjam di Indonesia, tidak terkecuali koperasi-koperasi yang beroperasi di Kota Tasikmalaya. Koperasi-koperasi yang beroperasi di Kota Tasikmalaya. Koperasi-koperasi yang sebelumnya menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP dengan format yang relatif sederhana kini dituntut untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dan tata cara penyajian laporan keuangannya agar selaras dengan ketentuan SAK EP. Perubahan standar ini membawa konsekuensi yang tidak sedikit, baik pada aspek pengakuan dan pengukuran transaksi, penyajian pos-pos laporan keuangan, maupun pada keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan koperasi secara umum.

Besarnya jumlah koperasi yang terus tumbuh di berbagai daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya, semestinya menjadi modal penting bagi penguatan perekonomian masyarakat. Namun demikian, pertambahan jumlah koperasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola, terutama pada aspek pelaporan keuangan yang menjadi tolok ukur sehat atau tidaknya sebuah koperasi. Kendala yang umum ditemui adalah penerapan standar akuntansi yang belum berjalan optimal, di mana koperasi yang baru bertransisi dari SAK ETAP menuju SAK EP masih memerlukan penyesuaian yang tidak sedikit, baik dari sisi pemahaman pengurus maupun kesiapan sumber daya manusia dan sistem pelaporannya (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Kondisi ini menyebabkan sebagian laporan keuangan koperasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya secara akurat dan menyeluruh, sehingga berpotensi menghambat fungsi laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan maupun alat pertanggungjawaban kepada anggota.

Ketidakmampuan koperasi dalam menerapkan SAK EP secara konsisten bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif terhadap regulasi, melainkan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha simpan pinjam serta kepercayaan anggota terhadap koperasinya. Tanpa penyajian laporan keuangan yang mengacu pada standar yang berlaku, koperasi akan kesulitan menggambarkan kondisi keuangannya secara utuh, termasuk dalam memisahkan antara simpanan anggota, modal koperasi, dan hasil usaha yang seharusnya dibagikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Persoalan ini menjadi semakin berat ketika koperasi hendak menjalin kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan lain maupun saat harus mempertanggungjawabkan kondisi keuangannya di hadapan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan. Koperasi yang tidak mampu menyajikan laporan keuangan secara valid dan sesuai standar berisiko kehilangan kepercayaan anggota serta pihak eksternal, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak koperasi untuk berkembang dan memperluas skala usahanya (Pratama et al., 2025).

Efektivitas penerapan suatu standar akuntansi pada koperasi tidak terlepas dari sejauh mana sosialisasi mengenai standar tersebut telah disampaikan kepada pengurus maupun pengelola koperasi. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif memberikan pemahaman awal mengenai perbedaan mendasar antara standar akuntansi lama dengan yang baru, sekaligus membekali pengurus dengan pengetahuan teknis mengenai tata cara pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain sosialisasi, tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pengurus koperasi turut menentukan keberhasilan penerapan standar tersebut dalam praktik sehari-hari. Pengurus yang memiliki pemahaman akuntansi yang memadai akan lebih mampu menerjemahkan ketentuan standar ke dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan koperasi secara andal. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman akuntansi berpotensi menimbulkan kesalahan pengakuan maupun penyajian pos-pos keuangan, meskipun sosialisasi mengenai standar tersebut telah dilakukan (Prihastuti & Sukri, 2024).

Argumen tersebut didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Rositasari et al., (2022) yang menguji pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan kesiapan pelaku usaha terhadap penerapan standar akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa intensitas sosialisasi yang diterima oleh pelaku usaha turut berperan bersama-sama dengan pemahaman akuntansi dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah standar akuntansi diterapkan secara benar. Semakin sering pelaku usaha memperoleh sosialisasi mengenai standar yang berlaku, dan semakin baik pemahaman akuntansi yang dimilikinya, semakin besar pula peluang standar tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan sehari-hari.

Persoalan minimnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman akuntansi ini bukan hanya dijumpai pada entitas usaha berskala nasional, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi-koperasi yang berada di daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Sebagaimana disampaikan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, hingga saat ini hanya sekitar 400 koperasi yang aktif dan secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, sementara sisanya masih menghadapi kendala dalam hal pembinaan dan tata kelola (Warsandi, 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian koperasi di Kota Tasikmalaya kemungkinan belum menerima sosialisasi SAK EP secara memadai dan belum memiliki pemahaman akuntansi yang cukup untuk menerapkannya secara efektif, sebagaimana juga ditemukan pada kajian transisi SAK ETAP ke SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Jawa Barat yang menyoroti keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu kendala utama (Setiajatnika & Hidayat, 2025)

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi dan tingkat pemahaman akuntansi memengaruhi efektivitas penerapan SAK EP, diperlukan kajian yang lebih terfokus pada koperasi-koperasi yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, mengingat wilayah ini memiliki jumlah koperasi yang terus bertambah namun proporsi koperasi aktifnya masih tergolong rendah.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas perekonomian yang cukup berkembang, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi tersebut, keberadaan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Kota Tasikmalaya, terdapat 16 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional yang telah bersertifikat dan menjadi objek penelitian ini. Koperasi-koperasi tersebut tersebar di beberapa kecamatan dan secara aktif memberikan layanan simpanan serta pinjaman kepada anggotanya sehingga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Meskipun jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang aktif menunjukkan adanya perkembangan kelembagaan koperasi di Kota Tasikmalaya, kualitas tata kelola keuangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut semakin penting sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) yang mulai efektif diterapkan pada 1 Januari 2025 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi. Perubahan dari SAK ETAP menuju SAK EP menuntut koperasi untuk menyesuaikan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan standar yang baru.

Namun demikian, proses transisi menuju penerapan SAK EP tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sosialisasi mengenai ketentuan SAK EP kepada pengurus koperasi. Sosialisasi yang belum merata mengakibatkan sebagian pengurus koperasi belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan. Di samping itu, tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pengurus koperasi juga masih beragam. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi SAK EP berpotensi belum terlaksana secara efektif, sehingga penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku.

Permasalahan tersebut juga tercermin dari kondisi koperasi di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, hingga saat ini hanya sekitar 400 koperasi yang masih aktif dan secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan sisanya masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek pembinaan, tata kelola organisasi, dan pengelolaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat koperasi yang belum memiliki kesiapan sumber daya manusia yang memadai dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku, termasuk SAK EP.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada beberapa Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya, masih ditemukan adanya perbedaan tingkat kesiapan dalam penerapan SAK EP. Sebagian koperasi telah mulai menyesuaikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar yang baru, namun masih terdapat koperasi yang belum sepenuhnya memahami perubahan klasifikasi akun, penyajian laporan keuangan, maupun pengungkapan yang diwajibkan dalam SAK EP. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi mengenai SAK EP juga belum diterima secara merata oleh seluruh pengurus koperasi, sehingga tingkat pemahaman akuntansi antar pengurus masih berbeda-beda. Kondisi tersebut diduga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi yang mewajibkan penerapan SAK EP dengan kondisi nyata yang dihadapi koperasi di lapangan. Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas implementasi standar akuntansi pada UMKM atau kualitas laporan keuangan koperasi secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh sosialisasi SAK EP dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam, khususnya di Kota Tasikmalaya, masih relatif terbatas. Padahal, kedua faktor tersebut merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi standar akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.

Merujuk pada berbagai persoalan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penulis terdorong untuk menelaah lebih jauh faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat efektivitas penerapan SAK EP di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya. Fokus kajian ini diarahkan pada pengujian pengaruh dua variabel, yakni sosialisasi SAK EP dan pemahaman akuntansi, terhadap efektivitas penerapan standar tersebut pada koperasi-koperasi yang beroperasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Berangkat dari fokus kajian tersebut, penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Efektivitas Penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari penjabaran latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa persoalan yang relevan dengan penelitian ini, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya belum optimal meskipun telah diwajibkan sejak 1 Januari 2025.
2. Sosialisasi SAK EP kepada pengurus koperasi diduga belum dilakukan secara merata.
3. Tingkat pemahaman akuntansi pengurus koperasi masih beragam sehingga memengaruhi efektivitas penerapan SAK EP.
4. Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi SAK EP dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya masih terbatas.

1.3 Batasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah tersebut, dan supaya kajian dalam penelitian ini tidak meluas serta tetap fokus pada tujuan yang ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi dan pemahaman akuntansi
2. Variabel dependen adalah efektivitas penerapan SAK EP
3. Penelitian ini menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan
4. Subjek penelitian adalah pengurus yang secara langsung terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Objek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kota Tasikmalaya

1.4 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari identifikasi serta batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi SAK EP berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya?
2. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya?
3. Apakah sosialisasi SAK EP dan tingkat pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengukur ada tidaknya pengaruh sosialisasi SAK EP terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengkaji pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya

3. Untuk menelaah pengaruh sosialisasi SAK EP dan tingkat pemahaman akuntansi secara simultan terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Kota Tasikmalaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang bersinggungan dengan penerapan standar akuntansi pada lembaga koperasi. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi bahan rujukan berharga bagi para peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji implementasi SAK EP dalam ekosistem perkoperasian, sekaligus memperkaya khazanah literatur ilmiah mengenai keterkaitan antara upaya sosialisasi, tingkat pemahaman akuntansi, dan keberhasilan penerapan standar keuangan di lapangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Koperasi di Kota Tasikmalaya: Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengurus koperasi dalam upaya memperkuat pemahaman dan kesiapan mereka menghadapi penerapan SAK EP, sehingga mutu laporan keuangan koperasi dapat terus mengalami peningkatan.
2. Bagi Dinas Koperasi & IAI: menyediakan bukti empiris sebagai dasar perancangan program sosialisasi dan pelatihan teknis SAK EP yang lebih terarah dan efektif bagi koperasi, khususnya koperasi Merah Putih yang baru terbentuk.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan maupun pembanding bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan kajian serupa terkait penerapan SAK EP, baik di lingkungan koperasi maupun entitas privat lainnya.